BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fenomena demonstrasi masif yang terjadi di Indonesia pada akhir Agustus hingga awal September 2025 menandai titik krusial dalam dinamika relasi antara masyarakat sipil, negara, dan media massa. Gelombang aksi kolektif yang dikenal dengan isu "17+8 Tuntutan Rakyat" tidak hanya merepresentasikan penolakan terhadap kebijakan tertentu, tetapi juga mencerminkan akumulasi ketidakpuasan publik terhadap tata kelola pemerintahan, proses pengambilan keputusan politik, serta distribusi keadilan ekonomi dan sosial. Kompleksitas isu yang terkandung dalam 17+8 menjadikannya bukan sekadar peristiwa demonstrasi, melainkan sebuah momen politik dan komunikasi yang sarat makna serta layak dikaji secara akademik.

Permasalahan 17+8 berawal dari penolakan masyarakat, khususnya mahasiswa, terhadap kebijakan pemberian tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar Rp50 juta per bulan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan. Isu ini kemudian berkembang menjadi krisis legitimasi yang lebih luas setelah terjadinya peristiwa kematian seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, pada 28

Agustus 2025 akibat insiden yang melibatkan aparat keamanan saat demonstrasi berlangsung. Peristiwa tersebut menjadi katalis yang memperluas skala protes dan mempertemukan berbagai kelompok masyarakat, buruh, pengemudi ojek online, aktivis, figur publik, hingga diaspora Indonesia dalam satu agenda tuntutan kolektif terhadap negara.

Gambar 1.1 Postingan Terkait Artikel CNN Indonesia

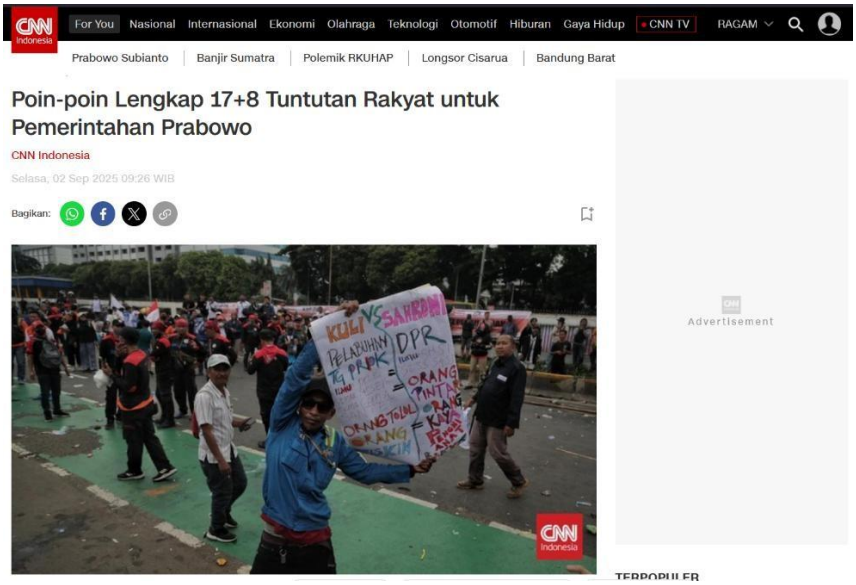

Sumber: Artikel CNN Indonesia 2 September 2025

Konsolidasi tuntutan publik tersebut kemudian terartikulasikan dalam dokumen “17+8 Tuntutan Rakyat” yang dipublikasikan pada 1 September 2025. Dokumen ini merupakan hasil kristalisasi dari ratusan aspirasi yang beredar di ruang digital dan dirumuskan oleh sejumlah figur publik dan influencer. Pembagian tuntutan ke dalam 17 poin jangka pendek dan 8 poin

jangka panjang menunjukkan bahwa permasalahan yang diangkat tidak bersifat sporadis, melainkan menyasar persoalan struktural yang meliputi transparansi anggaran DPR, reformasi kepolisian dan partai politik, keadilan fiskal, perlindungan hak sipil, serta penolakan terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap memberatkan rakyat, seperti rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Dalam konteks ini, permasalahan 17+8 tidak dapat dilepaskan dari kontradiksi struktural antara kebutuhan negara untuk meningkatkan penerimaan fiskal dan kemampuan ekonomi masyarakat. Rasio pajak Indonesia yang relatif rendah, disertai dengan perlambatan pertumbuhan konsumsi, memperlihatkan ketegangan antara logika kebijakan ekonomi negara dan realitas kesejahteraan publik. Ketegangan inilah yang kemudian diterjemahkan oleh masyarakat sipil ke dalam bentuk tuntutan politik dan sosial, yang selanjutnya diperebutkan maknanya di ruang publik melalui media massa.

Media online menjadi aktor kunci dalam proses tersebut. Dalam situasi di mana isu 17+8 lahir dan berkembang dari ruang digital, media tidak lagi berperan semata sebagai penyampai informasi, melainkan sebagai agen aktif yang melakukan seleksi, penekanan, dan interpretasi terhadap peristiwa. CNN Indonesia dan CNBC Indonesia, sebagai dua media online arus utama dengan orientasi editorial yang berbeda, memiliki potensi besar untuk membingkai isu

17+8 secara berbeda pula. CNN Indonesia cenderung menempatkan isu dalam kerangka politik, hukum, dan relasi kekuasaan, sementara CNBC Indonesia memiliki kecenderungan untuk menyoroti dimensi ekonomi, fiskal, dan dampaknya terhadap pasar serta stabilitas ekonomi.

Gambar 1.2 Postingan Terkait Artikel CNBC Indonesia

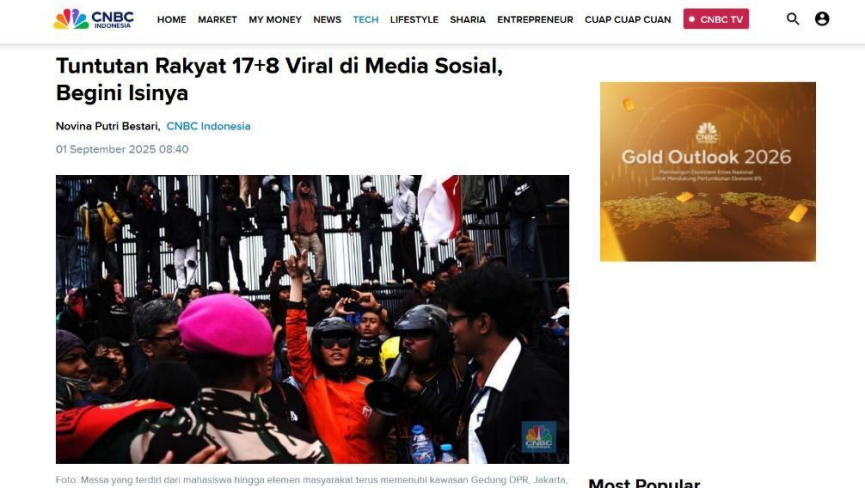

Sumber: Artikel CNBC Indonesia 1 September 2025

Perbedaan orientasi tersebut menjadi krusial karena isu 17+8 sendiri bersifat multidimensional. Media dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan reduksi kompleksitas melalui strategi pembingkaian tertentu: memilih aktor mana yang ditonjolkan, aspek tuntutan mana yang diprioritaskan, serta bagaimana relasi antara demonstrasi, stabilitas nasional, dan kebijakan pemerintah dikonstruksikan. Proses framing ini berpotensi membentuk persepsi publik tentang legitimasi gerakan 17+8, apakah ia

dipahami sebagai tuntutan rasional dan sah dalam demokrasi, atau justru sebagai gangguan terhadap ketertiban dan stabilitas.

Meskipun isu framing media telah banyak diteliti, terdapat research gap yang signifikan dalam konteks pemberitaan 17+8. Pertama, belum terdapat penelitian yang secara spesifik membandingkan framing pemberitaan antara CNN Indonesia dan CNBC Indonesia terhadap gerakan sosial domestik seperti 17+8. Padahal, perbedaan karakter media politik dan media ekonomi berpotensi menghasilkan konstruksi realitas yang berbeda dan memengaruhi pembentukan opini publik secara tidak seragam.

Kedua, sebagian besar penelitian framing di Indonesia masih didominasi oleh penggunaan model Robert N. Entman yang berfokus pada identifikasi masalah, penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi penyelesaian. Pendekatan ini relatif terbatas dalam mengungkap proses transformasi *frame* yang lebih dinamis, khususnya dalam konteks krisis sosial-politik yang kompleks. Model framing Erving Goffman, dengan konsep primary frameworks, keying, dan fabrication, menawarkan kerangka analisis yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana media menggeser, menyesuaikan, atau bahkan memanipulasi kerangka makna dalam pemberitaan. Namun, model ini masih jarang diaplikasikan dalam penelitian media di Indonesia.

Ketiga, penelitian terdahulu cenderung memisahkan analisis media mainstream dan media sosial, sementara fenomena 17+8 justru lahir dari konvergensi keduanya. Tuntutan yang diproduksi secara *bottom-up* di media sosial kemudian diadopsi, diamplifikasi, dan dibingkai ulang oleh media online. Dinamika ini menunjukkan adanya ekologi media yang kompleks, di mana arus informasi dan makna bergerak secara dua arah, namun belum banyak dikaji secara sistematis dalam penelitian komunikasi di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana media online membingkai isu 17+8 dan bagaimana perbedaan orientasi media memengaruhi konstruksi realitas yang dihadirkan kepada publik. Dengan menggunakan analisis *framing* model Erving Goffman dan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme pembingkaian berita dalam konteks gerakan sosial kontemporer serta kontribusi teoretis dan empiris bagi kajian komunikasi dan studi media di Indonesia.

1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian, maka fokus penelitiannya adalah "Bagaimana Analisis *Framing* Pada Pemberitaan 17+8 Pada Meida Online CNN Indonesia dan CNBC Indonesia?"

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana analisis framing *social framework* pada pemberitaan 17+8 pada media online CNN Indonesia dan CNBC Indonesia?
2. Bagaimana analisis framing *natural framework* pada pemberitaan 17+8 pada medai online CNN Indonesia dan CNBC Indonesia?
3. Bagaimana perbedaan ini tercermin dalam pemilihan *frame strips* (potongan aktivitas yang dipilih untuk diberitakan), seleksi narasumber, dan metafora yang digunakan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana *primary framework* (*natural frameworks vs social frameworks*) yang digunakan oleh CNN Indonesia dan CNBC Indonesia dalam mendefinisikan peristiwa 17+8 Tuntutan Rakyat.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedua media mengkontruksi atribusi kasualitas, apakah 17+8 dibingkai sebagai konsekuensi alamiah dari ketidakadilan struktural atau sebagai tindakan terarah dengan agensi dan intensi aktor-aktor tertentu.
3. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan premis dasar dan asumsi yang mendasari konstruksi berita antara CNN Indonesia dan CNBC Indonesia dalam memahami fenomena gerakan sosial.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Kontribusi teoritis yang paling signifikan dari penelitian ini terletak pada penggunaan konsep-konsep abstrak Goffman ke dalam instrumen analisis yang konkret dan dapat diaplikasikan untuk studi media massa di Indonesia. Konsep *primary frameworks* yang membedakan antara *natural frameworks* dan *social frameworks* memberikan kerangka untuk memahami bagaimana media mengkontruksi atribusi kausalitas dalam pemberitaan gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi fundamental terhadap literasi media yang sangat krusial pada era informasi, di mana setiap individu terpapar oleh volume berita yang masif dengan frame yang beragam dan seringkali konradiktif. Dengan memahami bagaimana media melakukan *framing, keying*, dan *fabrication* audiens dapat mengembangkan kemampuan kritis untuk tidak meremehkan suatu berita atau isu.